





Pengenaan *ujrah* melalui taksiran memenuhi unsur keadilan, yaitu barang (*marhun*) yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya lebih tinggi sehingga dikenakan *ujrah* lebih tinggi.

Dalam sistem *rahn* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, terjadi perbedaan pengenaan biaya *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan *marhun* (barang) dengan jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran yang sama, dan kondisi barang yang sama. Hal itu, disebabkan karena adanya diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya sewa (*ujrah*) yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman lebih kecil/di bawah nilai pinjaman maksimal, sehingga resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh nasabah menjadi berkurang.

Namun dalam praktek yang terjadi, penentuan prosentase tarif diskon *ujrah* di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, perhitungannya masih dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman nasabah. Untuk penjelasannya, sebagai berikut:

Bu Rini dan Bu Ida merupakan dua nasabah yang berbeda. Mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Sidokare Sidoarjo. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhun* sebesar Rp.2.257.910,- dan *marhun bih* (pinjaman) maksimal sebesar Rp.2.100.000,-. Jumlah pinjaman yang di ajukan oleh kedua nasabah tersebut berbeda:









menutup kemungkinan praktek yang dijalankan melenceng dari prinsip syariah.

Untuk membuktikan hal tersebut, agar tidak menjadi perdebatan antar masyarakat muslim, cendekiawan, pelajar dan sebagainya. Dengan melihat pada salah satu kasus pembiayaan antara Bu Rini dan Bu ida yang mana mereka sama-sama menggadaikan satu keping logam mulia berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat di Pegadaian Syariah unit Sidokare Sidoarjo dengan nilai taksiran marhun sama tetapi marhun bih berbeda dan biaya ujah pun berbeda. Hal ini sangatlah tidak adil, karena Bu Rini dan Bu ida menggadaikan barang yang sama dan nilai taksiran juga sama tetapi biaya ujahnya berbeda.

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, dalam penerapan prinsip ekonomi Islam keadilan. Dimana dalam menyelesaikan pembiayaan, Pegadaian Syariah Sidokare kurang menerapkan prinsip ekonomi Islam, ini terlihat pada prinsip keadilan yang kurang diterapkan dengan menzalimi nasabahnya.

Jadi persoalan pada skripsi ini adalah di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo dalam menjalankan transaksinya, yakni menerapkan biaya ujah itu tidak adil karena seperti kasus Bu ida dan Bu Rini yang mana seharusnya biaya ujahnya sama karena marhunnya juga sama, dan juga di Pegadaian Syariah Sidokare biaya ujahnya masih dikaitkan dengan besaran pinjaman yang mana dalam Fatwa Dewan Syariah



